



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr.Sam Ratulangi No. 1 Biak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 188.4/12/SK.KADINKES-BN/IKU/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019-2023**

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;

19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2019 – 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 8 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



DAUD N. DUWIRI, SKM, M.Kes
NIP.19780202 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Biak Numfor;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN
TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah.
FUNGSI : a. Perumusan kebijakan urusan kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Formulasi perhitungan: Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian oleh inspektorat dengan menilai komponen-komponen sesuai dengan mekanisme dan SOP yang telah ditentukan Tipe Perhitungan: Non Kumulatif	Sekretaris	Data Subag Program dan Informasi	
2.	Meningkatnya akses, mutu serta menurunnya	Persentase Neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	Formulasi perhitungan: Jumlah neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	

	angka kesakitan dan kematian		$\frac{\text{di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah neonatal di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$			
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	<p>Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kematian neonatal di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 1000$</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Angka kematian balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	<p>Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kematian balita di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 1000$</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{--- Jumlah bayi di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{---}} \times 100\%$</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	

			----- Jumlah balita di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu			
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Formulasi perhitungan: Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- X 100% Jumlah anak pada usia pendidikan dasar di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	Formulasi perhitungan: Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar X 100% ----- Jumlah ibu hamil di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Persentase pertolongan Persalinan di fasilitas kesehatan	Formulasi perhitungan: Jumlah Persalinan di fasilitas kesehatan ----- X 100% Jumlah ibu melahirkan di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	

		Persentase Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu ----- X 100% Jumlah ibu melahirkan di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah ibu melahirkan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- X 100% Jumlah ibu melahirkan di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- X 100% Jumlah usia 15 s.d. 59 tahun di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu</p>	Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Pelayanan Kesehatan	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar X 100%</p>	Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Pelayanan Kesehatan	

		skrining kesehatan sesuai standar	----- Jumlah 60 tahun ke atas di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu			
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar	Formulasi perhitungan: Jumlah kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar ----- X 100% Jumlah kunjungan di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu	Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Pelayanan Kesehatan	
		Persentase FKTP milik Pemerintah terakreditasi utama	Formulasi perhitungan: Jumlah FKTP milik Pemerintah terakreditasi utama ----- X 100% Jumlah FKTP milik Pemerintah	Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Pelayanan Kesehatan	
		Persentase TB mendapatkan pelayanan sesuai standar.	Formulasi perhitungan: Jumlah penderita TB mendapatkan pelayanan sesuai standar. ----- X 100% Jumlah penderita TB di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan	Formulasi perhitungan: Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV ----- X 100%	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian	

		pemeriksaan HIV sesuai standar	mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar ----- Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu	Penyakit	Penyakit	
		Angka penemuan kasus baru kusta	Formulasi perhitungan: Jumlah penemuan kasus baru kusta ----- X 100% Jumlah penderita kusta di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	
		Angka penemuan penderita Demam Berdarah Dengue (Inciden Rate DBD) per 100.000 penduduk	Formulasi perhitungan: Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (Inciden Rate DBD) ----- X Jumlah penduduk di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu 100.000%	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	
		Angka penemuan penderita malaria per 1.000 penduduk	Formulasi perhitungan: Jumlah penderita penemuan penderita malaria ----- X 1.000% Jumlah penduduk di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan	Formulasi perhitungan: Jumlah penderita hipertensi mendapatkan	Bidang Pencegahan	Data Bidang Pencegahan	

		pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah penderita hipertensi di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu</p>	Dan Pengendalian Penyakit	Dan Pengendalian Penyakit	
		Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah penderita Diabetes Melitus di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu</p>	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di suatu daerah dalam kurun waktu yang sama</p>	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	
		Persentase Kampung dan/atau Kelurahan UCI	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah Kampung dan/atau Kelurahan UCI</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah Kampung dan/atau Kelurahan</p>	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	

		Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi Campak	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah anak umur 1 tahun diimunisasi campak}}{\text{Jumlah anak umur 1 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	
		Persentase kampung dan/atau kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Kampung dan/atau kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam}}{\text{Jumlah Kampung dan/atau kelurahan mengalami KLB}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Data Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	
3	Meningkatnya sumber daya kesehatan dan upaya paradigma sehat	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kesehatan}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Cakupan ketersediaan obat esensial dan generik.	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah obat esensial dan generik.}}{\text{Jumlah obat esensial dan generik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Persentase sarana prasarana Puskesmas yang sesuai standar.	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah sarana prasarana Puskesmas yang sesuai standar.}}{\text{Jumlah sarana prasarana Puskesmas}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Bidang Pelayanan Kesehatan	

		Persentase PHBS rumah tangga strata utama dan paripurna	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Rumah tangga yang dinyatakan ber-PHBS}}{\text{Jumlah Rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Persentase kampung/kelurahan bebas rawan gizi.	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kampung/kelurahan bebas rawan gizi.}}{\text{Jumlah Kampung/kelurahan}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Persentase balita umur 7-23 bulan mendapat ASI	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah balita umur 7-23 bulan mendapat ASI}}{\text{Jumlah Balita dalam satu tahun}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Prevalensi Gizi Kurang (underweight) pada Anak Balita 0-60 bulan)	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Gizi Kurang (underweight) pada Anak Balita 0-60 bulan)}}{\text{Jumlah anak balita dalam tahun yang sama}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak Baduta (0-48 bulan)	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah anak balita yang mengalami stunting di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah anak balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Prevalensi anemi pada ibu hamil	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah penderita anemi pada ibu hamil}}{\text{Jumlah ibu hamil}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	

			Jumlah Ibu hamil dalam satu tahun			
		Persentase rumah sehat	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rumah sehat}}{\text{Jumlah Total rumah dalam tahun yang sama}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat	

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 8 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Kesehatan



DAUD N. DUWIRI, SKM, M.Kes
NIP. 19780202 199712 1 001